

Hasil Penelitian

ANALISIS PERBEDAAN PENYERAPAN ANGGARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN DI KOTA BANDUNG

(ANALYSIS OF THE DIFFERENCE IN BUDGET ABSORPTION OF THE DEVELOPMENT INNOVATION AND REGIONAL EMPOWERMENT PROGRAM IN BANDUNG)

*Siti Alia**, *Muhammad Andi Septiadi**, *Elisa Susanti***, *Mas Halimah***

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung 40614
Jawa Barat - Indonesia
Email: Aliaalya267@uinsgd.ac.id

**Universitas Padjajaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang 45363
Jawa Barat - Indonesia

Diterima: 06 Oktober 2019; Direvisi: 04 Maret 2020; Disetujui: 05 April 2020

ABSTRAK

Adanya perbedaan hasil realisasi anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Di Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka yang menentukan keberhasilan program. Mengingat Kelurahan Cihapit dan Merdeka sama-sama berada di kawasan perkotaan tetapi dari hasil realisasi anggaran tahun 2015 dan 2016 realisasi anggaran di Kelurahan Cihapit bisa mencapai 100% yaitu salah satu kelurahan terbaik yang ada di tengah perkotaan dalam pelaksanaan PIPPK dari lima kelurahan lainnya yang ada di Kota Bandung. Sedangkan Kelurahan Merdeka realisasi anggarannya hanya mampu mencapai 83,19% pada tahun 2015 dan 84,20% pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab perbedaan anggaran yang nantinya diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pihak-pihak terkait dalam perencanaan program kerja. Menggunakan teori Daniel L. Stufflebeam yaitu: Evaluasi Konteks, Input, Proses, dan Produk. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian Komparatif Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, wawancara dan studi lapangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability* yaitu *Purposive Sampling*, dan *Snowball Sampling*. Analisis dilakukan dengan cara mengevaluasi dua lokus penelitian, mengidentifikasi hambatan dan kendala mulai dari perencanaannya hingga dampak atau *impact* yang dirasakan masyarakat secara langsung, khususnya di Kelurahan Merdeka sehingga realisasi anggarannya tidak maksimal jika dibandingkan dengan Kelurahan Cihapit. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kelurahan Cihapit bisa lebih berhasil dibandingkan dengan Kelurahan Merdeka dikarenakan pengaruh dari faktor input dan konteks program yaitu berupa perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan sumber daya manusia.

Kata kunci: evaluasi, perbandingan, perencanaan anggaran

ABSTRACT

There are differences in the results of the realization of the Regional Development and Empowerment Innovation Program (PIPPK) budget in Kelurahan Cihapit and Kelurahan Merdeka that determine the success of the program. Considering that Kelurahan Cihapit and Kelurahan Merdeka are both located in urban areas, but from the results of the 2015 and 2016 budget realization, the budget realization in Kelurahan Cihapit can reach 100%, which is one of the best urban villages in the PIPPK implementation of the five other kelurahan in the urban area. Bandung. Whereas Kelurahan Merdeka realized its budget was only able to reach 83.19% in 2015

and 84.20% in 2016. Aim of this study is to find the reasons for budget differences that would later be expected to be an evaluation for related parties in work program planning. Using Daniel L. Stufflebeam's theory, namely: Evaluation of Context, Input, Process, and Product. The research method in this research is a Descriptive Comparative research method with a Qualitative approach, using data collection techniques through literature study, interviews and field studies. The sampling technique uses non-probability techniques namely Purposive Sampling, and Snowball Sampling. Analysis is done by evaluating the two research location, identify the obstacles and constraints, starting from the planning to the impacts, that felt by the community directly, especially in Kelurahan Merdeka, so that the realization of the budget is not optimal, compared to the Kelurahan Cihapit. The results of research and discussion show that the Regional Development and Empowerment Program in Kelurahan Cihapit can be more successful compared to Kelurahan Merdeka due to the influence of input factors and program context in the form of budget planning, procurement of goods / services and human resources.

Keywords: evaluation, compare, budget planning

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia semakin tertarik pada perumusan program kerja berbasis kebutuhan masyarakat di mana pemerintah pusat ingin membuat aparat Kewilayahan dapat berkolaborasi dengan masyarakat di daerahnya masing-masing, dalam memajukan kota baik di sektor ekonomi, infrastruktur dan lingkungan sosial. Hanya saja karakteristik dan budaya di berbagai daerah di Indonesia menjadi salah satu masalah dalam fase implementasi di lapangan, melonjaknya tingkat kejahatan serta banyak pelanggaran aturan (Koppenjan and Klijn, 2004), ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Macmillan and Cain, 2010; Norris, 2011; Levin *et al.*, 2012), dan tantangan globalisasi yang cukup berkontribusi pada kurangnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemerintah (OECD, 2015).

Di masa lalu, Inovasi hanya dianggap sebagai kegiatan perseorangan dan belum diperhitungkan untuk kegiatan pemerintah karena birokrasi dipemerintahan yang kaku membuat aparat lebih sulit untuk berinovasi (Downs, 1975). Saat ini pemerintah bebas membuat inovasi yang sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya masing-masing seiring dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah untuk berinovasi mengeluarkan kebijakan/program baru yang lebih transparan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Saat ini, pemerintah semakin percaya bahwa inovasi dalam kebijakan publik adalah alat yang dapat digunakan untuk kesejahteraan negara dan masyarakat dan merupakan upaya strategis dalam suatu negara dan salah satunya adalah kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kota Bandung.

PIPPK adalah Program pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan masyarakat yang mana inti dari kegiatannya yaitu mengharapakan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan

berlandaskan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, melalui program ini diharapkan dapat menjadi suatu stimulus inovasi dalam mengajak masyarakat untuk menumbuhkan suatu rasa memiliki terhadap daerahnya masing-masing. Tujuan lainnya adalah sebagai program percepatan pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan serta meningkatkan peran dan fungsi dari aparat pemerintah setempat untuk sampai ketahap sistem yang dinamakan *good governance*. Salah satu prinsip *good governance* adalah meningkatnya partisipasi masyarakat yang terlibat di dalam program ini, untuk itu dibutuhkan suatu tata kelola yang baik di mana membuat masyarakat dengan sukarela berpartisipasi aktif dalam program yang telah direncanakan oleh Pemerintahan Daerah (Sagita, 2016).

Penerapan suatu program kepada masyarakat memerlukan suatu analisis karakteristik untuk mengetahui kondisi dan kapasitas masyarakat agar ditemukan strategi program yang akan diterapkan di daerah tersebut, seperti dapat dilihat dari berbagai sisi, baik dari sisi ekonomi yaitu berupa pengetahuan mengenai kondisi perekonomian masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup sehari-hari, serta dapat dilihat dari perencanaan masyarakat dalam mengalokasikan dana untuk perbaikan-perbaikan perumahan dan pendapatan/gaji masyarakat setempat.

Sedangkan dari sisi sosial dapat dilihat dari jumlah penduduk, tingkat pendidikan, kondisi rumah layak huni dan status sosial masyarakat (Arofah and Suheri, 2018). Kelurahan Cihapit menurut hasil wawancara dan observasi peneliti didominasi oleh PNS sebanyak 1.696 (seribu enam ratus sembilan puluh enam) orang dan pegawai swasta sejumlah 1.016 (seribu enam belas) orang. Sedangkan di Kelurahan Merdeka pekerjaan masyarakatnya adalah TNI sebanyak 1.025 (seribu dua puluh lima) orang, dan pegawai swasta sejumlah 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) orang.

PIPPK adalah program unggulan Kota Bandung yang merupakan salah satu program prioritas yang digulirkan oleh Walikota Bandung periode 2013-2018. Bapak Ridwan Kamil yaitu dengan menggulirkan dana masing-masing 100 juta rupiah untuk setiap Lembaga Kemasyarakatan yang ada di seluruh wilayah Kelurahan di Kota Bandung dengan tujuan agar adanya pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di mulai dari lingkup wilayah terkecil dengan harapan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan di wilayahnya sendiri. Program ini meliputi perbaikan infrastruktur, pemberdayaan sosial ekonomi, kebersihan dan penguatan kelembagaan bagi LKK. Menurut Hidayat (2016) PIPPK merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Kelurahan, RW, PKK dan Karang Taruna.

PIPPK Merupakan Program yang digagas oleh Pemerintah Kota Bandung dengan mengucurkan dana yang dikelola oleh 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan di Kota Bandung sebagai pengguna anggaran dan penanggung jawab kegiatan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan setiap lembaga kemasyarakatan masing masing sejumlah 100 juta rupiah mulai dari RW, PKK, Karang Taruna dan LPM.

Keberhasilan program ini dilihat dari sejauh mana realisasi anggaran dapat terserap secara maksimal oleh masing-masing kecamatan khususnya kelurahan sebagai pengguna anggaran dan penanggungjawab kegiatan. Hanya saja program yang membutuhkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, masih belum disosialisasikan dengan baik. Seperti dikutip Sagita (2017) pada Survey Persepsi Publik JARI 2016 yang menyatakan bahwa 37% masyarakat tahu akan adanya PIPPK dan 63% tidak tahu akan adanya program ini.

Pemimpin menjadi peran penting dalam keberhasilan sebuah inovasi di suatu wilayah (Pitriyanti dan Harsasto, 2019). Terdapat 4 parameter yang diterapkan oleh Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung yaitu dengan mengarahkan bawahan terhadap lingkungan baru, belajar dari kesalahan, melakukan koreksi dan menggunakan empati dalam memimpin sehingga dapat menghasilkan *win win solution*.

Dimana didalam suatu pembangunan melewati proses *integrative*, secara tataran perencanaan, implementasi serta menjalankan program dengan berkelanjutan untuk masyarakat yang sejahtera. Diharapkan peran pemimpin untuk menggerakkan roda organisasi dengan baik (Azizah, 2018). Implementasi terhadap PIPPK pernah diteliti oleh Akbar (2018) yang mana menghasilkan perencanaan

pembangunan berbasis partisipatif di Kota Bandung berupaya untuk mencapai pembangunan bagi kesejahteraan, dapat dilaksanakan dengan baik apabila mengajak masyarakat terlibat didalam PIPPK.

Berbeda tempat dengan penelitian yang dilakukan Syahrin (2018) yang meneliti implementasi kebijakan PIPPK di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Bojongloa Kaler pada tahun 2017 belum optimal dan masih harus dilakukan peningkatan.

Penelitian di Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung yang dilakukan oleh Risdiyanto (2019) menyimpulkan bahwa pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung sudah cukup baik, tetapi masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara efektif. Kendala yang dihadapi adalah petugas pelaksana PIPPK yang belum sepenuhnya memiliki kapasitas dan kapabilitas bagaimana memahami standar dan syarat-syarat untuk melaksanakan program PIPPK. Penelitian Putri dan Rachmawati (2018) tentang pengendalian PIPPK menyimpulkan bahwa, pengendalian PIPPK masih belum optimal karena regulasi yang belum jelas dan sumber daya manusia yang kurang memadai.

Penyerapan anggaran sejak digulirkan dan diimplementasikan pada jajaran kelurahan menjadi fokus penelitian. Penelitian melakukan evaluasi dengan membandingkan dua lokus penelitian yaitu kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dengan Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung. Hal tersebut dilakukan karena Kelurahan tersebut berada di wilayah pusat kota Bandung dengan jarak yang berdekatan, tetapi dari hasil realisasi anggarannya tahun 2015 dan 2016 memiliki perbedaan penyerapan realisasi anggaran.

PIPPK untuk kelurahan Cihapit mencapai 100% sedangkan Kelurahan Merdeka hanya mencapai 83,19% di tahun 2015 dan di tahun 2016 ada peningkatan di angka 84,20% tetapi masih jauh berada di bawah Kelurahan Cihapit. Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan dengan cara mengevaluasi dua lokus penelitian tersebut apa yang menjadi hambatan atau kendala mulai dari perencanaannya hingga dampak atau *impact* apa yang bisa dirasakan masyarakat secara langsung khususnya di Kelurahan Merdeka sehingga realisasi anggarannya tidak maksimal jika dibandingkan dengan Kelurahan Cihapit.

Perbedaan penyerapan anggaran yang sangat berbeda di antara dua kelurahan yang saling berdekatan menjadi rumusan masalah penelitian. Perbedaan anggaran tersebut dapat

berdampak pada perencanaan-perencanaan kedepan dalam pelaksanaan PIPPK. Rangkaian untuk menganalisis penyebab perbedaan penyerapan anggaran menggunakan empat rangkaian evaluasi, yaitu: evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk (Stufflebeam, Daniel, 2002).

Penelitian ini penting untuk dikaji karena hingga saat ini PIPPK masih menjadi program unggulan Pemerintah Kota Bandung, yang bertujuan untuk menstimulus partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Kota Bandung. PIPPK menggunakan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan disalurkan kepada agar masyarakat terdorong untuk lebih peduli terhadap lingkungan, baik dari segi pembangunan maupun kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

METODE

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2013). Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin mengetahui bagaimana hasil evaluasi PIPPK yang dilakukan di Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan dan Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung dan untuk mengetahui secara mendalam faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program PIPPK Di Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan. Menggunakan penelitian jenis studi kasus dengan teknik studi pustaka, studi lapangan, dan wawancara. Teknik pemilihan data menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Handcock and Gile, 2011).

Sumber data pada penelitian ini berupa data sekunder dan primer. Data sekunder berasal dari jurnal ilmiah untuk mengetahui penelitian terdahulu. Sedangkan data primer bersumber dari dokumen-dokumen terkait yang berasal dari instansi pusat dan kelurahan (*Purposive*) dan studi lapangan. Studi lapangan mencakup observasi terhadap hasil PIPPK dan wawancara informan. Informan penelitian terdiri dari: Kepala Subbag Bina pemerintahan Kecamatan pada Bagian pemerintahan umum Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai pemegang kelompok kerja bidang pelaksana dan pengendalian tingkat Kota Bandung; Lurah Merdeka dan Lurah Cihapit sebagai kuasa pengguna anggaran; ketua paguyubaban RW; Ketua LPM; Ketua Tim Penggerak PKK; Ketua Karang Taruna kelurahan Cihapit dan Merdeka sebagai pengguna anggaran; serta, masyarakat sebagai yang menikmati hasil dari PIPPK.

Teknik analisis menggunakan model integrative. Komponen-komponen yang digunakan yaitu: reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL & PEMBAHASAN

Evaluasi Konteks. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Lurah Cihapit Drs. Iwan Gunawan, bahwa warga masyarakat dikelurahan cihapit sebagian besar merupakan masyarakat bisnis yang terkesan atau terlihat seperti lebih individualis. Terdiri dari 8 RW dan 46 RT, Kelurahan Cihapit memiliki jumlah penduduk 6.272 jiwa pada Desember tahun 2015 yang terdiri dari 3012 jiwa laki-laki dan 3.260 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Cihapit saat ini mencapai sekitar 1.040 KK.

Mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Cihapit didominasi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1.696 orang dan pegawai swasta 1.016 orang. Beragam karakteristik menjadi kendala untuk mengajak warga masyarakat terlibat aktif dalam program pemberdayaan kewilayahan yang membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Seperti mengadakan pertemuan yang diadakan oleh kelurahan, baik untuk sosialisasi maupun musyawarah, dan untuk menetapkan prioritas kebutuhan warga di wilayahnya. Terkadang tidak semua warga yang diundang bisa hadir karena kesibukan masing-masing.

Berdasarkan informasi dari ketua lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan Cihapit yaitu informan 4, 5, 6, dan 7, pada saat sosialisasi mengenai PIPPK ini digulirkan oleh Tim Pengarah Pelaksana PIPPK Kelurahan Cihapit, pihak lembaga kemasyarakatan memiliki keraguan akan adanya partisipasi masyarakat yang penuh terhadap program ini. Berbagai target yang harus dicapai serta mekanisme yang lebih rumit dibandingkan program sebelumnya. Tetapi dengan adanya kerjasama yang solid dan keterbukaan yang terbangun antara Tim Pengarah PIPPK yang ada di Kelurahan Cihapit dan Kecamatan Bandung Wetan, beserta empat lembaga kemasyarakatan yaitu RW, PKK, Karang Taruna dan LPM. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di dalam Peraturan Walikota No. 436 tahun 2015, sehingga saling mendukung untuk menggerakkan warganya agar ikut terlibat secara aktif dalam program ini. Walaupun memang pada kenyataannya tidak semua warga ikut berpartisipasi, masih banyak yang bersikap tidak peduli terhadap program-program yang digulirkan Pemerintah. Kelurahan Cihapit secara aktif mensosialisasikan program pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan di daerahnya sehingga dapat menstimulus masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan dari program pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan di daerah Cihapit.

Jika dibandingkan dengan Kelurahan Merdeka, setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan 3 yaitu Lurah Merdeka Bapak Cece Sahroni, SH. Menurut beliau, Tim Pengarah Pelaksana PIPPK Kelurahan Merdeka sudah cukup maksimal mulai dari memberikan sosialisasi mengenai PIPPK melalui musrenbang yang diwakilkan oleh empat lembaga kemasyarakatan yaitu RW, PKK, LPM dan Karang taruna. Diakui oleh beliau, kendala yang dihadapi yaitu lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Merdeka yang aktif hanya beberapa orang saja. Perwakilannya mulai dari RW, PKK, LPM dan Karang Taruna dan sumberdaya manusia yang ada di kelurahan sendiri sebagai Tim Pengarah Pelaksana PIPPK. Tahun 2015 beberapa mulai memasuki masa pensiun sehingga segala proses pertanggungjawaban PIPPK dibebankan ke pada satu orang. Kurangnya koordinasi antara fasilitator, menyebabkan pendampingan kepada masyarakat kurang maksimal.

Kelurahan Merdeka terdiri dari 9 RW dan 58 RT. Kelurahan Merdeka memiliki jumlah penduduk 9.373 jiwa pada Desember tahun 2015, terdiri dari: 4.852 jiwa laki-laki dan 4.521 jiwa perempuan. Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Merdeka saat ini mencapai sekitar 2.775 KK. Mata pencaharian masyarakat di Kelurahan Merdeka didominasi oleh TNI sebanyak 1025 orang dan pegawai swasta 1135 orang.

Kelurahan Merdeka sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah TNI dan mata pencahariannya sebagian besar berprofesi sebagai TNI. Diakui oleh lurah Merdeka bahwa kendala yang dihadapi adalah mereka tidak bisa tinggal di tempat untuk waktu yang lama karena tugas sebagai prajurit TNI harus siap dipindah kapan saja. Sehingga tidak bisa fokus untuk bisa ikut serta dalam program pembangunan utamanya PIPPK. Kendala selanjutnya adalah TNI mempunyai program atau anggaran tersendiri bagi pembenahan infrastruktur di wilayahnya, misalnya: perbaikan gorong-gorong atau saluran air, perbaikan jalan. Sehingga dengan adanya PIPPK ini terkesan menjadi *double* anggaran. Menurut Lurah Merdeka belum ada solusi lebih lanjut mengenai penanganannya, sejauh ini dana PIPPK masih digunakan di daerah lingkungan TNI dengan alasan penyerapan anggaran.

Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka keduanya secara bersama-sama melaksanakan PIPPK sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan Walikota. Pada tahun 2015 dan 2016, prioritas anggaran PIPPK sebagian besar difokuskan pada pembangunan Infrastruktur yang mencapai 40% dan

merupakan prioritas utama kegiatan untuk dilaksanakan.

Kelurahan Cihapit lebih berhasil dalam penyerapan anggaran yaitu mencapai 100% pada tahun 2015 dan 2016. Berdasarkan wawancara dengan Lurah Cihapit, mengatakan bahwa pada awalnya mereka bersama-sama berkomitmen dengan pengurus lembaga kemasyarakatan untuk menfokuskan realisasi anggaran pada perbaikan infrastruktur, seperti perbaikan saluran air, perbaikan branggang, perbaikan balai RW dan perbaikan pos kamling serta perbaikan jalan skala kecil, serta perbaikan taman. Karena memang sudah diamanatkan untuk dana PIPPK 2015 dan 2016 masih terfokus pada perbaikan infrastruktur di setiap wilayah, lalu selebihnya dialokasikan untuk kegiatan lainnya sesuai lingkup LKK masing-masing.

Hal senada juga diakui oleh informan lain yaitu Ketua dari masing-masing Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Cihapit. Anggaran tahun 2015 dan 2016 kegiatan lebih difokuskan pada perbaikan infrastruktur serta kelengkapan untuk menunjang kegiatan setiap lembaga kemasyarakatan. Perbaikan saluran air diutamakan karena saat hujan deras sering terjadi genangan-genangan bahkan banjir yang tentunya sangat mengganggu. Lalu adanya perbaikan branggang bahkan pembongkaran karena branggang yang seharusnya digunakan untuk saluran air, oleh beberapa rumah warga dibangun sebagai tambahan ruangan di rumah pribadi.

Partisipasi empat lembaga kemasyarakatan yaitu: RW, PKK, LPM, serta Karang Taruna, merupakan faktor kekuatan paling utama dalam pelaksanaan program PIPPK. Penentuan prioritas kebutuhan warga, walaupun partisipasi masyarakat belum sepenuhnya, hanya sebagian pengurus saja yang aktif. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat maka program ini bisa dikatakan gagal dan hal ini tidak terlepas bantuan dari pihak Tim Pengarah PIPPK dari Kelurahan Cihapit yang aktif memberikan dorongan, dukungan, maupun motivasi yang positif dengan cara langsung turun ke lapangan dan meyakinkan warga akan manfaat yang bisa didapat dari adanya PIPPK.

Begitu pula dengan PIPPK yang dilaksanakan di Kelurahan Merdeka, berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Merdeka Bapak Cece Sahroni, SH. Beliau mengatakan bahwa program yang menjadi prioritas kegiatan tahun 2015 dan 2016 adalah perbaikan infrastruktur meliputi perbaikan gorong-gorong atau saluran air, perbaikan pos kamling, perbaikan gapura, perbaikan jalan skala kecil dan perbaikan balai RW.

Kelurahan Merdeka pada tahun 2015 dan 2016 menganggarkan pada pembelian belanja modal, seperti: pembelian personal komputer untuk RW, Karang Taruna, dan LPM; pembelian motor triseda untuk pengangkut sampah pada setiap RW; dan, pengadaan timbangan untuk posyandu pada kegiatan PKK. Hal tersebut juga diakui oleh Ketua paguyuban RW dan Ketua LPM Kelurahan Merdeka. Pada tahun 2015 dan 2016, usulan dan realisasi kegiatan lebih kepada perbaikan infrastruktur dan pembelian belanja modal untuk LKK, untuk kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Namun, tingkat partisipasi masih rendah dan tidak rutin dilakukan sehingga dampaknya belum dirasakan.

Mayoritas penduduk Kelurahan Merdeka adalah penduduk lanjut usia dengan tingkat perekonomian menengah ke atas. Pentingnya peningkatan pengetahuan, kemampuan serta pengetahuan pegawai untuk menjalankan program kerja yang bersifat lintas sektor, serta partisipasi masyarakat, kegiatan pelatihan kader

LPM, Karang Taruna dan PKK haruslah menjadi penghubung antara kebutuhan program serta proses kemandirian masyarakat.

Evaluasi Input. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tatang Hamdani, M.P, yang menyebutkan bahwa kebutuhan awal yang paling krusial di Kota Bandung adalah perbaikan infrastruktur. Mulai dari tingkat kewilayahan seperti perbaikan gorong-gorong atau saluran air skala kecil, perbaikan gedung serbaguna milik RW, perbaikan fasilitas umum seperti lapangan yang ada di lingkup RW, perbaikan jalan yang ada di sekitar lingkungan RW. Termasuk juga perbaikan rumah yang tidak layak huni apabila dananya mencukupi dari PIPPK. Selebihnya digunakan untuk program kegiatan lainnya yang menunjang seperti: pelatihan-pelatihan pemberdayaan untuk usia produktif; kegiatan sosial kemasyarakatan; ekonomi mikro; dan, juga kegiatan kebersihan lingkungan.

Tabel 1. Perbandingan Evaluasi Konteks Kelurahan Merdeka dan Kelurahan Cihapit

No.	Context Evaluation	Kelurahan Cihapit	Kelurahan Merdeka
1.	Peluang	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pengarah / fasilitator sangat terbuka memberikan informasi • Koordinasi dan komunikasi antara tim pengarah / fasilitator sangat terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pengarah / fasilitator Kurang terbuka dalam memberikan informasi • Koordinasi dan komunikasi antara tim pengarah / fasilitator kurang terbuka
2.	Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> • SDM ahli • Partisipasi masyarakat • Peninjauan kembali besaran anggaran per wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • SDM ahli • Partisipasi masyarakat • Peninjauan kembali besaran anggaran per wilayah • Lebih kepada uang tunai (khususnya di wilayah-wilayah ekonomi lemah)
3.	Kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program prioritas Pemerintah Kota Bandung • Anggaran untuk program kegiatan LKK tersedia • Perwal No 346 Tahun 2015 • Integrasi dan koordinasi Tim fasilitator 	<ul style="list-style-type: none"> • Program prioritas Pemerintah Kota Bandung • Anggaran untuk program kegiatan LKK tersedia • Perwal No 346 Tahun 2015
4.	Kelemahan/hambatan	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan masyarakat yang kurang responsive terhadap program 	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan masyarakat yang kurang responsive terhadap program • Koordinasi yang minim antara tim fasilitator, tim fasilitator dengan warga
5.	Prioritas kegiatan untuk dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan infrastruktur • Kegiatan sosialisasi dan pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan Infrastruktur • Belanja modal untuk LKK
6.	Program Kegiatan yang benar-benar dibutuhkan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan infrastrukur

Sumber: Data Penelitian (2018)

Tabel 2 dan 3 menampilkan anggaran PIPPK tahun 2015 dan 2016 dari masing-masing Kelurahan yaitu Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka. Terlihat segi anggaran, kedua kelurahan sudah sesuai dengan Perwal No. 436 Tahun 2015, yaitu sebesar 100 juta rupiah per lembaga kemasyarakatan. Kelurahan Merdeka jumlahnya lebih besar mengingat jumlah RW di Kelurahan Merdeka sendiri memang lebih banyak yaitu ada 9 RW, selebihnya semua sama jumlahnya.

Input program kegiatan di dua kelurahan tersebut, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Lurah Cihapit dan Lurah Merdeka. Mereka menyatakan bahwa input program kegiatan diusulkan langsung melalui masing-masing lembaga kemasyarakatan mulai dari RW, PKK, Karang Taruna dan LPM pada saat tahap perencanaan kegiatan. Apabila sudah sesuai dengan kode rekening dan sesuai dengan lingkup kegiatan yang tercatat dalam Perwal No.436 Tahun 2015 dan dananya bisa *tercover* oleh dana PIPPK, maka program kegiatan tersebut bisa direalisasikan.

Perbandingan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Merdeka dan Kelurahan Cihapit dari segi fisik memang jauh berbeda. Menurut informasi yang didapatkan dari Lurah Merdeka, Kelurahan Merdeka belum pernah melakukan renovasi kantor Kelurahan secara

keseluruhan. Renovasi hanya pada bagian pelayanan saja, karena diperintahkan untuk ruangan pelayanan diwajibkan adanya renovasi yang anggarannya bersumber dari APBD pada tahun 2014. Tetapi untuk renovasi kantor secara keseluruhan belum dilaksanakan padahal sudah tiga kali dari pihak Kelurahan melakukan pengajuan untuk renovasi bangunan kantor.

Berbeda dengan gedung RW, gedung RW atau yang lebih sering disebut dengan balai RW anggaran perbaikannya memang sudah tersedia dari PIPPK yang merupakan hasil usulan warga untuk perbaikan yang masuk pada kategori perbaikan sarana dan prasarana. Setelah melakukan wawancara dengan ketua LKK yang ada di Kelurahan Merdeka, beliau menyampaikan bahwa ruangan sekertariat jarang digunakan apabila ada rapat lebih sering mengadakan rapat di aula kelurahan. Ruangan tersebut hanya digunakan untuk menyimpan barang-barang saja karena bisa dilihat sendiri kondisinya lebih seperti gudang penyimpanan barang. Sarana dan prasarana untuk LKK di Kelurahan merdeka yang menyangkut pada ruangan sekertariat belum maksimal, karena ruangan tersebut akan diperbaiki apabila usulan renovasi kantor kelurahan bisa dilaksanakan. Sarana dan prasarana lain seperti *personal computer*, ATK dan belanja modal lainnya, sudah *tercover* oleh dana PIPPK atas usulan dari masing-masing kebutuhan LKK.

Tabel 2. Anggaran PIPPK Cihapit

No.	Program/Kegiatan	Besaran (RP)
1	Fasilitas Pemberdayaan Lingkup RW (8 RW)	Rp. 800.000.000
2	Fasilitas Pemberdayaan Lingkup PKK	Rp. 100.000.000
3	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Rp. 100.000.000
4	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	Rp. 100.000.000
Jumlah Dana PIPPK 2015		Rp. 1.100.000.000

Sumber: PIPPK Kelurahan Cihapit 2015 dan 2016

Tabel 3. Anggaran PIPPK Merdeka

No.	Program/Kegiatan	Besaran
1	Fasilitas Pemberdayaan Lingkup RW (9 RW)	Rp. 900.000.000
2	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK	Rp. 100.000.000
3	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	Rp. 100.000.000
4	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	Rp. 100.000.000
Jumlah Dana PIPPK 2015-2016		Rp. 1.200.000.000

Sumber: PIPPK Kelurahan Merdeka 2015 dan 2016

Tabel 4. Hasil evaluasi input antara kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka

No.	Input Evaluation	Kelurahan Cihapit	Kelurahan Merdeka
1.	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pembagian tugas fasilitator, satu LKK satu fasilitator • Diperlukan SDM ahli sebagai fasilitator tambahan agar lebih focus terhadap program-program PIPPK • Diperlukan kaderisasi yang terarah dan berkelanjutan bagi keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan karena masih kesulitan dalam mencari SDM yang mau peduli mengurus LKK. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pembagian tugas, empat LKK dipegang oleh satu fasilitator (1 kasi) • Diperlukan SDM ahli sebagai fasilitator tambahan agar lebih focus terhadap PIPPK • Diperlukan kaderisasi yang terarah dan berkelanjutan bagi keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan karena masih kesulitan dalam mencari SDM yang mau peduli mengurus LKK.
2.	Sumber Daya Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap LKK mendapatkan 100 jt rupiah • Perlu ditinjau kembali apakah realisasi anggaran menjadi menjadi salah satu syarat utama berhasilnya PIPPK di suatu wilayah • Anggaran sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap LKK mendapatkan 100 jt rupiah • Perlu ditinjau kembali apakah realisasi anggaran menjadi menjadi salah satu syarat utama berhasilnya PIPPK di suatu wilayah • Anggaran sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah
3.	Sarana dan Prasarana yang Digunakan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasana LKK seperti ruangan yang dipakai LKK yang sudah direnovasi dan digunakan sesuai dengan fungsinya • Belanja modal pembelian motor roda tiga (triseda), dan ATK termasuk ke dalam sarana dan prasarana sudah tercover dari dana PIPPK berdasarkan kebutuhan LKK 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana dan prasana LKK ruangan yang dipakai LKK yang belum direnovasi dan tidak digunakan sesuai dengan fungsinya • Belanja modal Personal computer, ATK dan belanja modal lainnya yang termasuk ke dalam sarana dan prasarana sudah tercover dari dana PIPPK berdasarkan kebutuhan LKK
4.	Input program kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Lebih merata, mulai dari input perbaikan infrastruktur, belanja modal berupa motor pengangkut sampah, hingga pelatihan dan sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Input kegiatan lebih banyak pada belanja modal seperti pembelian personal computer dan pembelian motor pengangkut sampah dan perbaikan infrastruktur, untuk pelatihan dan sosialisasi belum sepenuhnya dilaksanakan

Sumber: Data Penelitian (2018)

Evaluasi Proses. Untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan, apakah program terlaksana sesuai dengan rencana atau tidak, setiap aktifitas memonitor setiap perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat. Evaluasi proses merupakan sumber informasi penting untuk menafsirkan hasil evaluasi produk. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan pelaksanaan program dilaksanakan belum sesuai dengan rencana pelaksanaan, baik dari sisi jadwal maupun pelaksana program belum mampu menangani kegiatan selama program berlangsung.

Terutama untuk Kelurahan Merdeka belum adanya pembagian tugas yang merata untuk Tim Pengarah Pelaksana PIPPK di Kelurahan merdeka sebagai fasilitator untuk masing-masing Lembaga Kemasyarakatan. Sehingga realisasi anggaran maupun realisasi kegiatannyapun tidak maksimal. Pada tahun 2015 hanya mencapai 83,19% dan pada tahun 2016 ada peningkatan yaitu sebesar 84,20%.

Berbeda dengan Kelurahan Cihapit, meskipun pelaksanaan program belum sesuai dengan rencana pelaksanaan dari sisi jadwal. Kelurahan Cihapit terlihat lebih siap dalam

melaksanakan PIPPK dibuktikan dengan pencapaian realisasi anggaran dan kegiatan yang maksimal. Pencapaian mencapai 100% pada tahun 2015 dan 2016. Pencapaian ini dikarenakan kuatnya koordinasi yang dijalankan antara Tim Pengarah Pelaksana PIPPK Kecamatan, Kelurahan, dan dengan masing-masing Lembaga Kemasyarakatan.

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara di Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka sebenarnya mekanisme dalam proses penyelenggaraan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan kurang lebih sama. Mulai dari tahap sosialisasi dari pihak kelurahan kepada perwakilan empat lembaga kemasyarakatan. Pada tahap sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2015 diadakan bersamaan dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yaitu yang berlangsung pada bulan Januari 2015.

Menurut Bapak Tatang Hamdani, M.PA., bahwa PIPPK pada tahun 2015 mulai persiapan sampai dengan pelaksanaan waktunya terkesan terburu-buru karena harus menunggu persetujuan DPRD. Tetapi tentunya keterlambatan ini tidak bisa menjadi penghalang akan berjalannya program kegiatan PIPPK. Kelurahan Cihapit dan Merdeka tetap melakukan sosialisasi PIPPK yang diadakan bersamaan dengan kegiatan musrenbang.

Hal ini diperkuat oleh informasi yang didapatkan dari Bapak Cece Syahoni, S.H selaku Lurah Merdeka. Kegiatan sosialisasi PIPPK pada tahun 2015 persiapannya cukup terburu-buru. Karena PIPPK mekanismenya berbeda dengan program-program sebelumnya, yaitu adanya pencatatan pelaporan dengan baik, dan menjelaskan kepada masyarakat. PIPPK bukan berbentuk bantuan langsung uang tunai melainkan program kegiatan yang dibiayai sebesar 100 juta dalam bentuk kegiatan.

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada pihak Kelurahan Cihapit dan Merdeka menyatakan bahwa pencairan dana dinilai terlambat. Karena kegiatan harus mulai berjalan dari bulan maret maka pihak kelurahan menggunakan mekanisme GU (ganti uang). Dimana kegiatan di lapangan tetap dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan ada penggantian uang setelah dana PIPPK cair yaitu bulan agustus 2015.

Proses pengorganisasian masyarakat, sudah terbentuk jauh sebelum adanya PIPPK, seperti diatur dalam Perda Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang sering disingkat LKK.

Monitoring dan Evaluasi eksternal hanya sebatas penyaksian secara langsung, realisasi kegiatan baik fisik maupun non fisik di lapangan oleh perwakilan dari Lembaga Kemasyarakatan. Contohnya, apabila ada pembangunan infrastruktur pembuatan saluran air di suatu RW pembangunan tersebut pasti disaksikan oleh perwakilan RW dan masyarakat sekitar tempat pembangunan saluran air, begitupun realisasi kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan disaksikan langsung oleh LKK.

Hal ini diperkuat oleh Ketua Forum RW Kelurahan Cihapit, Ketua LPM di Kelurahan Cihapit, Ketua Forum RW Kelurahan Merdeka, dan Ketua LPM di Kelurahan Merdeka. Informasi yang diperoleh bahwa kegiatan monitoring dilakukan bersamaan dengan realisasi kegiatan cukup dengan adanya kehadiran perwakilan dari LKK dan masyarakat setempat pada saat kegiatan berlangsung. Hal tersebut berguna untuk melihat langsung material yang digunakan (pembangunan fisik) apakah sudah sesuai atau belum. Bagaimana program kegiatan berjalan secara efektif dan efisien seperti pemantauan pelatihan kepada masyarakat apabila memang ada penyelenggaraan pelatihan. Tetapi diakui oleh pihak LKK tidak semua masyarakat melihat langsung untuk memonitoring kegiatan karena memang kendala di waktu tidak semua masyarakat bisa ikut berpartisipasi secara langsung.

Mekanisme monitoring dan evaluasi memang belum sesuai dengan juknis atau Perwal nomor 436 tahun 2015 mengenai mekanisme monitoring dan evaluasi PIPPK, dengan alasan terbatasnya waktu dan terbatasnya personel di kelurahan sendiri. Hambatan lainnya pihak kelurahan diburu waktu untuk memaksimalkan realisasi hingga pelaporannya juga harus selesai. Maka kelurahan memerlukan personel atau SDM tambahan untuk pelaksanaan PIPPK agar berjalan maksimal dan sesuai dengan Perwal yang sudah diamanatkan agar hasilnya pun lebih maksimal.

Evaluasi Produk. Pertama-tama untuk Evaluasi Produk peneliti mengamati hasil rekapitulasi serapan anggaran PIPPK yang ada di dua Kelurahan yaitu Kelurahan Merdeka dan Kelurahan Cihapit pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Peneliti dapatkan pada tahun 2015 serapan realisasi anggaran PIPPK di Kelurahan Merdeka hanya mencapai 83,19% dan untuk tahun 2016 naik menjadi 84,20%, rendah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Tabel 5. Perbandingan Evaluasi proses Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka

Kelurahan Merdeka	Kelurahan Cihapit
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program belum sesuai dengan rencana pelaksanaan dari sisi jadwal mulai dari tahap persiapan yaitu sosialisasi, tahap perencanaan seperti penyusunan rencana program, hingga ke tahap pelaksanaan (pencairan dana PIPPK) dan pelaporan dan evaluasi, karena ada keterlambatan pencairan dana PIPPK terutama pada tahun 2015 • Untuk tahun 2016 sudah mulai ada perbaikan karena berkaca pada tahun 2015 persiapannya jauh lebih matang dan tidak ada keterlambatan pencairan dana • Belum adanya pembagian tugas yang merata untuk Tim Pengarah Pelaksana PIPPK di Kelurahan merdeka sebagai fasilitator untuk masing-masing Lembaga Kemasyarakatan • Pengorganisasian masyarakat sudah terbentuk jauh sebelum adanya PIPPK, ini diatur dalam Perda Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang sering disingkat LKK. • Mekanisme monitoring dan evaluasi belum sesuai dengan juknis No.436 tahun 2015. • Mekanisme monitoring dan evaluasi internal masih sebatas pelaporan secara berkala mengenai realisasi anggaran yang telah dilaksanakan • Mekanisme monitoring dan evaluasi eksternal baru sebatas kehadiran masyarakat pada saat pelaksanaan di lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan program belum sesuai dengan rencana pelaksanaan dari sisi jadwal mulai dari tahap persiapan yaitu sosialisasi, tahap perencanaan seperti penyusunan rencana program, hingga ke tahap pelaksanaan (pencairan dana PIPPK) dan pelaporan dan evaluasi, karena ada keterlambatan pencairan dana PIPPK terutama pada tahun 2015 • Untuk tahun 2016 sudah mulai ada perbaikan karena berkaca pada tahun 2015 persiapannya jauh lebih matang dan tidak ada keterlambatan pencairan dana • Adanya pembagian tugas yang merata untuk Tim Pengarah Pelaksana PIPPK di Kelurahan Cihapit sebagai fasilitator, untuk masing-masing Lembaga Kemasyarakatan 1 fasilitator. • Pengorganisasian masyarakat sudah terbentuk jauh sebelum adanya PIPPK, ini diatur dalam Perda Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang sering disingkat LKK. • Mekanisme monitoring dan evaluasi belum sesuai dengan juknis No.436 tahun 2015. • Mekanisme monitoring dan evaluasi internal masih sebatas pelaporan secara berkala mengenai realisasi anggaran yang telah dilaksanakan • Mekanisme monitoring dan evaluasi eksternal masih sebatas kehadiran masyarakat pada saat pelaksanaan di lapangan

Sumber: Data Penelitian (2018)

Menurut data dari Lurah Merdeka, penyerapan anggaran PIPPK 2015 lebih banyak pada belanja modal untuk lingkup RW, LPM, PKK, dan Karang Taruna. Belanja modal mencapai Rp 506.508.770 untuk pengadaan: kendaraan motor pengangkut sampah roda tiga, pengadaan alat timbangan/blora, dan pengadaan *personal computer*, serta pengadaan alat kantor lainnya. Rincian kegiatan PIPPK tahun 2016 di Kelurahan merdeka tidak mendapatkan data yang terperinci mengenai realisasi anggaran karena rekap laporan belum sepenuhnya selesai, sehingga pihak kelurahan merasa keberatan untuk memberikannya.

Pada tahun 2017 serapan anggaran untuk belanja modal harus ditiadakan dan lebih difokuskan pada perbaikan infrastruktur yang belum selesai di tahun sebelumnya yang belum terselesaikan. Pada tahun 2017 di Kelurahan merdeka, terdapat tambahan kegiatan sosial yaitu pembagian sembako bagi masyarakat miskin. Perbaikan infrastruktur yang difokuskan pada lingkup RW. Realisasi penyerapan anggaran PIPPK tahun 2015 sebesar Rp 147.272.900 meliputi: belanja pemeliharaan jalan, pemeliharaan/perbaikan gedung dan bangunan, serta pemeliharaan kanal.

Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 34.427.100 dari kegiatan infrastruktur dari total Rp 181.700.000. Sedangkan sisanya serapan anggaran direalisasikan pada belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, belanja ATK dari masing-masing LKK, belanja bibit tanaman, pakaian LINMAS, belanja tenaga ahli dan narasumber kegiatan pelatihan yang digunakan oleh lingkup PKK, LPM, dan Karang Taruna, penyewaan peralatan untuk kegiatan hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan dan Hari Jadi Kota Bandung.

Sedangkan realisasi anggaran yang tidak terserap di Kelurahan Merdeka pada tahun 2015 adalah belanja makan dan minum kegiatan di lingkup RW sekitar Rp 90.000.000. Sedangkan yang terpakai hanya Rp 42.744.000 untuk kegiatan pertemuan, dan rapat-rapat lingkup RW. Tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakatnya sangat rendah sehingga anggaran untuk makan dan minum rapatnya tidak terserap dengan maksimal, bahkan pada tahun 2015 di lingkup RW tidak ada kegiatan pelatihan maupun sosialisasi sehingga anggarannya tidak terserap sama sekali.

Berbeda dengan lingkup PKK, LPM, serta Karang Taruna, serapan anggaran makan dan

minum rapat dapat terserap lebih optimal karena untuk kegiatan pertemuan, pelatihan, kegiatan hari-hari besar seperti HUT RI dan HUT Kota Bandung yang sering diadakan oleh ketiga LKK tersebut. Berdasarkan data daftar perbaikan infrastruktur dari anggaran PIPPK pada tahun 2015 di Kelurahan Merdeka mulai dari RW 01 hingga RW 09. Realisasinya mulai dari perbaikan saluran air, perbaikan bangunan RW, perbaikan jalan, hingga renovasi pos kamling di masing-masing RW secara merata sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut informasi dari ketua paguyuban RW Kelurahan Merdeka, manfaat yang paling terasa dari PIPPK adalah perbaikan infrastruktur dibandingkan dengan misalnya pelatihan dan sosialisasi. Perbaikan fisik kepentingan umum seperti saluran air dan gorong-gorong yang tadinya apabila hujan airnya meluap dan menyebabkan genangan sekarang sudah lumayan berkurang walaupun belum sepenuhnya optimal. Bangunan seperti perbaikan balai serba guna diharapkan meningkatkan partisipasi warga untuk hadir ke pertemuan dengan tempat yang lebih nyaman. Perbaikan pos kamling diharapkan untuk keamanan warga. Intinya adalah perbaikan infrastruktur diharapkan menjadi stimulasi pada warga masyarakat untuk lebih ikut terlibat pada kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan PIPPK.

Berbeda dengan program kegiatan pelatihan, menurut Ketua LPM Kelurahan Merdeka, setelah PIPPK berjalan selama 2 tahun kegiatan pelatihan seperti pelatihan tata boga, pelatihan membuat kerajinan tangan, *urban farming* dan lain sebagainya belum dimanfaatkan secara optimal oleh warga masyarakat karena memang belum ada hasil yang berkelanjutan dari program-program pelatihan tersebut hingga saat ini.

Pelatihan yang diharapkan mampu mendorong warga masyarakat utamanya masyarakat kelas menengah ke bawah agar lebih mandiri dengan harapan, dampak dari pelatihan. Misalnya pembuatan kue basah bisa meningkatkan kemampuan ibu-ibu yang mengikuti pelatihan bisa berlanjut hingga membuka usaha pembuatan kue basah sendiri dan menambah penghasilannya sehari-hari belum bisa direalisasikan. Sama seperti pelatihan *urban farming* hingga saat ini belum ada hasil yang nyata dari pelatihan tersebut, karena minat masyarakat juga yang rendah, dan waktu pelatihan yang terbatas. Sehingga pemahamannya juga tidak maksimal dan sebaiknya pelatihan terfokus pada satu bidang yang memang diminati oleh masyarakat banyak sehingga lebih bisa berkelanjutan hasilnya.

Selanjutnya peneliti membandingkan realisasi anggaran PIPPK yang ada di Kelurahan Cihapit. Penyerapan PIPPK Tahun 2015 dan 2016 di Kelurahan Cihapit merata di semua aspek, baik itu infrastruktur, pemberdayaan dan inovasi ekonomi lokal seperti pelatihan wirausaha, bidang sosial kemasyarakatan, fasilitasi penguatan kelembagaan seperti belanja modal untuk setiap LKK, serta aspek lainnya yang termasuk ke dalam daftar pengguna anggaran PIPPK. Walaupun kesulitan dalam menghadapi masyarakat yang kurang *responsive* terhadap program ini, tetapi tim fasilitator di Kelurahan Cihapit terus berusaha semaksimal mungkin agar dana PIPPK terserap secara maksimal untuk kebutuhan masyarakat sendiri nantinya.

Sedangkan untuk tahun 2017 PIPPK di Kelurahan Cihapit sebagian besar perencanaan realisasi masih terfokus pada perbaikan di infrastruktur dan pembuatan *vertical garden* untuk lingkup RW, pembongkaran brangang yang ada di beberapa RW yang disinyalir menjadi penyebab utama adanya banjir. Untuk lingkup LPM, PKK dan Karang Taruna lebih difokuskan pada kegiatan pelatihan-pelatihan dan sosialisasi yang sifatnya memang sesuai dengan lingkungannya masing-masing.

Berdasarkan data kelurahan Cihapit, penyerapan anggaran lebih banyak pada perbaikan infrastruktur yaitu mencapai Rp 387.812.500 pada tahun 2015. Perbaikan tersebut meliputi: perbaikan gorong-gorong atau saluran air yang ada di 8 RW, penataan taman lingkungan di RW 01 dan 04 dan 07, perbaikan kantor RW di RW 01 dan RW 06, perbaikan pos ronda di RW 03,07 dan 08, dan perbaikan gapura di RW 03. Lalu ada belanja modal motor pengangkut sampah untuk kedelapan RW, belanja peralatan kebersihan, belanja makan dan minum kegiatan seperti kegiatan halal bihalal, kegiatan makan dan minum penataan PKL, makan dan minum rapat-rapat dan sosialisasi yang digelar LPM, PKK dan Karang Taruna.

Pada tahun 2016 sudah terekap sejumlah Rp 246.435.500, perbaikannya pun sebagian besar masih sama, yaitu perbaikan saluran air. Terdapat perbedaan yaitu tahun 2106 ada perbaikan brangang yaitu saluran air yang berada di belakang rumah penduduk, pengadaan alat biopori untuk 8 (delapan) RW, adanya belanja bahan baku kegiatan pembuatan struktur organisasi, papan informasi dan papan kelembagaan RW.

Kegiatan dan penyerapan anggaran di Kelurahan Cihapit sudah merata dibandingkan dengan Kelurahan Merdeka. Menurut informasi dari ketua LPM, PKK dan Karang Taruna di

Kelurahan Cihapit, untuk PIPPK 2015 kegiatan LPM banyak melakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut diantaranya: bahaya penggunaan narkoba, wabah demam berdarah, penanggulangan bencana kebakaran, keberadaan RW siaga, manajemen perkoperasian, manajemen organisasi, dan bintek administrasi RT/RW. Sedangkan untuk tahun 2016 kegiatan ditambah dengan sosialisasi wirausaha baru dan kegiatan senam jantung sehat, kerja bakti lingkungan, kegiatan bulan bakti gotong royong.

Karang Taruna lebih banyak terlibat dalam kegiatan yang rutin diselenggarakan setiap tahun seperti: perayaan HUT kemerdekaan RI dan perayaan hari jadi Kota Bandung. Tahun 2015 diadakan kegiatan *outbond* untuk anggota karang taruna dan kegiatan partisipasi KAA ke-60. Kegiatan *urban farming* di tahun 2016 ditiadakan dan dialihkan menjadi kegiatan lingkup PKK. Selanjutnya di tahun 2016 diadakan kegiatan, seperti: pelatihan tata cara penyablonan kaos, penguatan kelembagaan karang taruna, pelatihan dasar kepemimpinan bagi anggota karang taruna, dan belanja pakaian kerja lapangan.

Menurut ketua TPPKK Kelurahan Cihapit, kegiatan lingkup PKK sudah rutin dilakukan setiap tahun, mengikuti arahan PKK kota Bandung, sebelum Adanya PIPPK. Perbedaannya yaitu dari segi anggaran yang tersedia lebih khusus. Kegiatannya meliputi, belanja kartu posyandu, kegiatan bina wilayah, kegiatan dasa wisma, kegiatan penyuluhan lansia, kegiatan PKK Kota, untuk pelatihannya meliputi pelatihan *public speaking*, tata boga, dan pelatihan mesin obras.

Hambatan yang dirasakan yaitu antusias masyarakat dari segi kehadiran yang masih minim untuk kegiatan pelatihan, seperti: pelatihan obras, tata boga, *urban farming*, tata cara penyablonan. Pelatihan dilakukan satu atau dua hari dan belum terlihat dampak kelanjutan dari hasil pelatihan. Kondisi ini terjadi di Kelurahan Merdeka dimana pelatihan yang diberikan belum efektif.

Analisis perbedaan penyerapan anggaran Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka. PIPPK merupakan upaya pemerintah kota Bandung memperkuat kewilayahan yang ada di kota Bandung agar masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi demi kesejahteraan daerah yang mereka tempati. PIPPK yang sudah berjalan ini membutuhkan masyarakat untuk ikut serta dalam menjalankan setiap program – program yang telah ditetapkan bersama. Dengan modal yang diberikan pemerintah kota Bandung sebesar 100 Juta bagi setiap wilayah dan LKK, dengan model program

yang dibuat secara langsung mengikuti usulan dari masyarakat diharapkan program ini tidak sia sia, dalam pemaparan di atas didapati masih kurangnya partisipasi masyarakat di kelurahan merdeka sehingga cukup mempengaruhi penyerapan anggaran di daerah tersebut.

Perencanaan anggaran termasuk hal utama yang harus disiapkan. Kelurahan Cihapit dalam melaksanakan perencanaan anggaran sudah cukup baik karena bisa memaksimalkan setiap anggaran yang diterima yaitu dengan merencanakan perbaikan infrastruktur, sosialisasi, pelatihan dan mengadakan acara-acara di wilayahnya, sedangkan di daerah kelurahan Merdeka masih belum optimal pada bagian sosialisasi serta pelatihan kepada warga maupun kepada aparatur sipil negara di daerahnya.

Percepatan penyerapan anggaran sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusia dan kondisi lingkungan di daerahnya (Fauzi, 2019), yaitu dilihat dari kecakapan pegawai dalam melaksanakan setiap program – program kewilayahan yang sudah ditetapkan, apakah itu kecakapan berbicara di depan umum untuk mensosialisasikan program maupun kecakapan pada bidang perencanaan. Kelurahan Merdeka mengalami sedikit masalah pada kondisi lingkungan internal karena banyaknya aparatur sipil negara yang bekerja di kelurahan Merdeka sedang dalam proses menuju masa pensiun dan membuat masih kurang optimalnya PIPPK di wilayah tersebut.

Penyerapan anggaran menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program kerja bagi pemerintahan, oleh karena itu melihat secara jelas perbedaan penyerapan anggaran di antara kedua kelurahan yang berdekatan sejatinya akan menjadi bahasan penting untuk diangkat di dunia ilmiah, dengan ditemukannya faktor-faktor penyebab perbedaan anggaran kita dapat mengetahui hal apa yang dapat dievaluasi untuk perencanaan pekerjaan kedepan. Dari pemaparan hasil di atas ditemukan ada beberapa faktor yang menjadikan perbedaan penyerapan anggaran di antara kedua kelurahan yang saling berdekatan yaitu faktor perencanaan anggaran, pengadaan barang/jasa dan kurangnya SDM.

PIPPK bertujuan untuk menstimulus partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Kota Bandung, yang kiranya tidak mengeluarkan dana dari APBD yang sedikit untuk pelaksanaan program ini. Memahami faktor-faktor penarik minat partisipasi masyarakat, serta program-program kerja yang telah dilaksanakan kelurahan Cihapit, dapat menjadi awal bagi Kelurahan lainnya dalam perencanaan program.

Tabel 6. Perbandingan Evaluasi produk realisasi anggaran PIPPK Kelurahan Cihapit dan Kelurahan Merdeka

No	Indikator	Kelurahan Cihapit	Kelurahan Merdeka
1.	Tujuan program: Mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan PIPPK yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.	Koordinasi antara Tim Pengarah sebagai fasilitator sudah baik, bagitupun dengan perwakilan LKK yang kurang adalah partisipasi aktif dari masyarakatnya sehingga pemberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal, masyarakat masih individualis.	Koordinasi antara Tim Pengarah sebagai fasilitator belum terwujud, masih terkesan bekerja sendiri-sendiri, sehingga komunikasi pada LKK apalagi pada masyarakat di Kelurahan Merdeka jauh dari optimal, sehingga hasil realisasi anggaranpun tidak maksimal
2.	Hasil dari Program	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi anggaran mencapai 100% di tahun 2015 dan 2016 • Realisasi perbaikan infrastruktur diantaranya perbaikan gorong-gorong/saluran air, brangang, perbaikan gapura, perbaikan pos kamling, perbaikan balai RW, perbaikan penerangan jalan, pemeliharaan taman lingkungan • Pelatihan meliputi Pelatihan tata boga dan <i>public speaking</i>, pelatihan penggunaan mesin obras, pelatihan penanggulangan bencana kebakaran, donor darah, pelatihan penanaman tanaman obat, pelatihan baca tulis Al-qur'an, pelatihan urban farming, pelatihan kewirausahaan. • sosialisasi gejala pemakaian narkoba, sosialisasi manajemen perkoprasian, sosialisasi keberadaan RW siaga, sosialisasi wabah demam berdarah, kegiatan penyuluhan lansia, kegiatan dasa wisma, kegiatan bina wilayah •perayaan hari besar (HUT Kota Bandung, HUT Kemerdekaan RI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi anggaran 2015 sebesar 83,19% dan tahun 2016 sebesar 84.20 % • Realisasi perbaikan infrastruktur diantaranya perbaikan gorong-gorong/saluran air, brangang, perbaikan pos kamling, perbaikan balai RW, pemeliharaan taman lingkungan • Realisasi anggaran belanja modal (Pembelian motor triseda, personal computer untuk LKK, pembelian mebeuleur / meja kursi), pembelian timbangan blora, pembelian alat olah raga, belanja mesin pres batako, belanja mesin alat pencacah sampah • Pelatihan urban farming, pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan kue basah, pelatihan pembuatan batako • Sosialisasi RW siaga, sosialisasi penanggulanagan narkoba • perayaan hari besar (HUT Kota Bandung, HUT Kemerdekaan RI)
3.	Kebutuhan yang telah terpenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • realisasi anggaran tahun 2015 dan 2016 sebesar 100% sudah memenuhi semua usulan warga mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pelatihan-pelatihan dan sosialisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • realisasi anggaran belum maksimal realisasi lebih menitik beratkan pada perbaikan infrastruktur dan pembelian belanja modal untuk pelatihan dan sosialisasi belum terlaksana secara maksimal maka dari itu masih banyak anggaran yang belum terserap
4.	Hasil jangka panjang dari program	perbaikan infrastruktur mulai dari perbaikan gorong-gorong, perbaikan pos kamling, pemeliharaan taman lingkungan, perbaikan trotoar dan saluran air, perbaikan balai RW, penerangan jalan. Untuk pelatihan belum maksimal karena belum menghasilkan untuk akibat jangka panjangnya kecuali manajemen perkoprasian, koperasi berjalan dengan baik hingga saat ini dibawah binaan LPM	<ul style="list-style-type: none"> • perbaikan infrastruktur mulai dari perbaikan gorong-gorong, perbaikan pos kamling, pemeliharaan taman lingkungan, perbaikan trotoar dan saluran air, perbaikan balai RW • untuk pelatihan belum ada hasil jangka panjangnya, perlu adanya pelatihan yang berkelanjutan yang paling sesuai dengan minat warga di Kelurahan Merdeka.

Sumber: Data penelitian (2018)

Tidak dapat dipungkiri bahwa penyerapan anggaran selain menjadi penilaian keberhasilan suatu program kerja di Indonesia, serta memberikan dampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar dan masyarakat Kota Bandung pada umumnya karena terjadinya perputaran roda ekonomi yang baik. Sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Kelurahan lainnya agar sedini mungkin menghindari masalah yang terjadi. Seperti, kekurangan SDM di Kelurahan Merdeka sehingga mengakibatkan kurang optimalnya penyerapan anggaran di wilayah tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan dengan menggunakan Evaluasi Konteks, Input, Proses dan Produk dari Daniel L. Stufflebeam (2002), menyimpulkan bahwa pelaksanaan PIPPK yang ada di Kelurahan Cihapit lebih berhasil dibandingkan dengan Kelurahan Merdeka. Hal ini disebabkan karena faktor konteks program dan input program yang menjadi penentu keberhasilan PIPPK di Kelurahan Cihapit yaitu berupa perencanaan program, pengadaan barang/jasa serta kurangnya sumber daya manusia. Walaupun tingkat respon masyarakat Kelurahan Cihapit sendiri belum optimal karena PIPPK sudah hampir 3 tahun berjalan masih ada warga yang belum paham apa itu PIPPK. Namun, berkat koordinasi yang dilakukan fasilitator atas arahan Lurah dan Camat anggaran dapat terserap maksimal hingga 100%. Meskipun, masih ada kekurangan setelah dievaluasi dari segi konteks, input, proses, hingga produk. Terbukti dengan SDM yang berkualitas dan terintegritas maka suatu program bisa lebih berhasil dilaksanakan, dibandingkan dengan wilayah yang SDMnya kurang terintegrasi dengan baik.

REKOMENDASI

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kelurahan Merdeka perlu memerhatikan indikator konteks dan indikator input untuk dapat meningkatkan penyerapan anggaran dari PIPPK.
2. Agar implementasi Inovasi PIPPK dapat berjalan dengan baik perlunya ditingkatkan partisipasi masyarakat.
3. Agar SDM memenuhi kualifikasi dibutuhkannya pelatihan-pelatihan yang mumpuni terutama di bidang IT dan Public Speaking.
4. Agar kualitas program dapat terjamin diperlukannya pengawas program bukan hanya keuangan tapi pengawasan terhadap

program yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Segenap partisipan yang telah membantu dalam penyelesaian Jurnal ini terutama kepada Lurah Cihapit beserta jajaran dan Lurah Merdeka beserta jajarannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar. 2018. Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Lokal: Studi Di Kota Bandung. *Jurnal Reformasi Administrasi Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, pp. 101–108. doi: <https://doi.org/10.31334/reformasi.v5i2.269>.
- Arofah, L. and Suheri, T. 2018. Kajian Pengembangan Kampung Kreatif Studi Kasus Kampung Kreatif Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 5(2), pp. 32–38.
- Azizah, P. P. 2018. Analisis Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Di Kecamatan Cinambo Kelurahan Babakan Penghulu Kota Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Bekhet, A. K. and Zauszniewski, J. A. 2012. Methodological triangulation: An approach to understanding data. *Nurse researcher*. RCN Publishing Company, 20(2).
- Downs, A. 1975. *Inside bureaucracy*. Boston: MA: Little, Brown.
- Fauzi, A. 2019. Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), pp. 87–101.
- Handcock, M. S. and Gile, K. J. 2011. Comment: On The Concept Of Snowball Sampling. *Sociological Methodology*. SAGE publications Sage CA: Los Angeles, CA, 41(1), pp. 367–371.
- Hidayat, A. 2016). Peningkatan Layanan Publik Melalui Smart Governance Dan Smart Mobility. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4(2), pp. 87–96.
- Koppenjan, J. F. M. and Klijn, E.-H. 2004. *Managing Uncertainties In Networks: A Network Approach To Problem Solving And Decision Making*. Routledge London.
- Levin, K. et al. 2012. Overcoming The Tragedy Of Super Wicked Problems: Constraining Our Future Selves To Ameliorate Global Climate Change. *Policy sciences*. Springer, 45(2), pp. 123–152.
- Macmillan, P. and Cain, T. 2010. Closing the gap: Eliminating The Disconnect Between Policy Design And Execution. *Washington, DC: Deloitte*.
- Muyana, S. 2017. Context Input Process Product

(CIPP): Model Evaluasi Layanan Informasi. in *Prosiding Seminar Bimbingan Dan Konseling*, pp. 342-347.

Norris, P. 2011. *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge University Press.

OECD. 2015. *Innovation Policies for Inclusive Growth*. OECD Publishing Paris.

Pitriyanti, D. and Harsasto, P. 2019. Kepemimpinan Ridwan Kamil Di Kota Bandung Tahun 2013-2018: Kajian Inovasi Kebijakan Kepemimpinan Adaptif. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(02), pp. 101-110.

Putri, G. M. and Rachmawati, E. 2018. Pengendalian Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (Studi Di Pippk Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung). *Jurnal Sosial Politik Unla*, 23(1), pp. 45-56.

Risdiyanto, D. 2019. Implementasi Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (Studi Pada Kecamatan Kiaracondong Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat). Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sagita, N. I. 2016. Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Di Kota Bandung. *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp. 308-329. doi: <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10009>.

Sagita, N. I. 2017. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Bandung. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 1(2).

Silalahi, U. 1992. Studi Tentang Administrasi Konsep Teori, Dimensi. *Bandung: Sinar Baru*.

Stufflebeam, Daniel, L. 2002. *The CIPP Model For Evaluation*. Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kauntitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syahrian, D. 2018. Implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) pada Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tahun 2017. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.